



The Effect of Inflation Rate and Currency Exchange Rate on Value Added Tax Revenue at the Pratama Medan Timur Tax Office

Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Yonson Pane ¹, Sherly Avelina ²

^{1,2}Akuntansi, STIE Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

Currency Exchange Rate,
Inflation Rate,
Value Added Tax,
Import

Abstract. *The purpose of this study was to determine the effect of inflation rates and currency exchange rates on the acceptance of Value Added Tax at the Pratama Medan Timur Tax Office. The research methodology used is descriptive quantitative method. The type of data used in this study is quantitative data, namely the data obtained in the form of numbers or figures. The data source is secondary data. Secondary data were obtained from companies, journals and books related to inflation rates, currency exchange rates and import value added tax receipts. The population and sample in this study amounted to 60 data. The results of the analysis show that the inflation rate has no but significant effect on the import value added tax revenue at KPP Pratama Medan Timur. Currency exchange rates have a significant effect on the import value added tax at KPP Pratama Medan Timur. Inflation rate and currency exchange rate have a significant effect on import value added tax revenue at the East Medan Tax Office.*

Corresponding author*

Email: yonson.sitorus83@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam memajukan perekonomian negara Republik Indonesia, kita perlu melaksanakan pembangunan nasional. Dimana kesejahteraan rakyat adalah salah satu faktor yang penting dalam kehidupan perekonomian. Pembangunan tersebut memerlukan dana yang besar agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagian besar sumber pendapatan yang didapat untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tidak hanya bisa bergantung dari



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



satu pendapatan berupa sumber daya alam saja, tetapi sebagian besar pendapatan negara yang menjadi unsur utama dalam hal itu adalah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat mewujudkan program pembangunan. Menyadari hal itu pemerintah telah menetapkan target setiap tahunnya yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati urutan kedua dalam hal penyumbang penerimaan negara setelah pajak penghasilan. Besarnya kontribusi PPN bagi penerimaan negara, tentunya memerlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan mendorong dan memudahkan pelaksanaan pemungutan PPN. Kebijakan tersebut dapat berupa penyempurnaan peraturan perpajakan atau penerbitan kebijakan fiskal yang dapat menstimulus transaksi-transaksi ekonomi sehingga memacu arus barang dan jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu bentuk arus barang dan jasa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). adalah kegiatan impor, yang biasa disebut dengan PPN Impor. Berdasarkan Undang-Undang No.42 tahun 2009, impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dalam sistem perekonomian terbuka.

Impor merupakan komponen yang bersifat negatif terhadap pendapatan nasional karena mengurangi pendapatan dari dalam negeri. Namun, disisi lain impor juga merupakan satu-satunya opsi untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri.

Sebagai indikator dalam menstabilkan tingkat impor, inflasi juga akan mengakibatkan turunnya daya saing barang dan jasa di dalam negeri karena tingginya harga dan akhirnya memicu aktivitas impor guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, bila tingkat inflasi tinggi maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor akan tinggi.

Nilai tukar mata uang jika dikaitkan dengan kegiatan impor, maka ketika nilai mata uang rupiah melemah, maka jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar negara tentunya akan semakin besar. Oleh karena itu, bila nilai tukar rupiah rendah maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor akan tinggi.

Adanya pengaruh dua indikator ekonomi makro diatas terhadap aktivitas impor maka berhubungan dengan harga jual terutama pada nilai impor yang menjadi dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok yang menjadi indikator perbaikan kondisi ekonomi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi Kontribusi penerimaan perpajakan khususnya untuk penerimaan PPN Impor tahun 2013 memiliki penerimaan sebesar Rp 139,8 triliun dan pada tahun 2014 sebesar Rp 152,3 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 12,5 triliun dari tahun 2013. Pada Tahun 2015 penerimaan PPN Impor sebesar Rp. 130,1 triliun sehingga mengalami kenaikan Rp. 11 triliun dari tahun 2014. Pada tahun 2016 penerimaan PPN Impor sebesar Rp. 122,8 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 7,3 triliun dari tahun 2015. Pada tahun 2017 penerimaan PPN Impor sebesar Rp. 149,2 triliun sehingga



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



mengalami kenaikan sebesar Rp. 26,4 triliun dari tahun 2016. Pada tahun 2018 penerimaan PPN sebesar Rp. 157,5 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,3 triliun dari tahun 2017

Tingkat kestabilan nilai impor harus dijaga sehingga dapat mendorong perekonomian nasional tanpa mengganggu penerimaan dari sektor pajak khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menstabilkan tingkat impor, yaitu tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah. Inflasi merupakan peningkatan harga barang/jasa yang terjadi secara terus menerus. Nilai tukar rupiah atau sering disebut dengan kurs valuta asing adalah jumlah mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu nilai mata uang asing.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 2). Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Mata Uang terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 3). Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. KAJIAN LITERATUR

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Salman (2017:238) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam daerah pabean atau atas impor Barang Kena Pajak (BKP).

Indikator yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Data tersebut berisikan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada wilayah Medan Timur.

Tingkat Inflasi

Menurut Mankiw (2014:141) inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan seiring berjalannya waktu. Indikator yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Bank Indonesia. Tingkat Inflasi tersebut dihitung dan disusun oleh Bank Indonesia dengan tujuan sebagai acuan bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Nilai Tukar Mata Uang

Menurut Ambarwati (2010:241) nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai (harga) mata uang suatu negara yang dinilai dengan mata uang negara lainnya. Indikator yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan keputusan dari Menteri Keuangan yang dikeluarkan secara berkala.

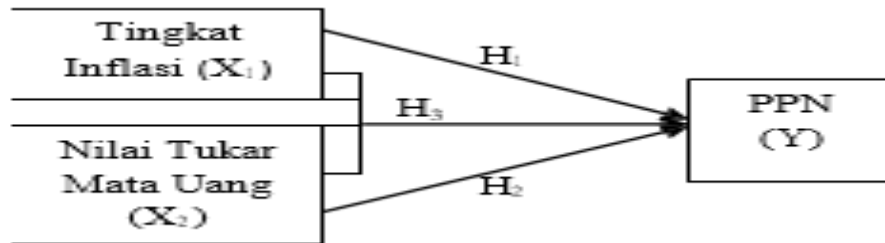
Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Gambar 1. Kerangka Teoritis

3. METODOLOGI

Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan www.bi.go.id.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah data yang diambil adalah data dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara bulanan yang berjumlah 5 tahun dikali 12 bulan yang berarti 60 data/bulan yang diambil menjadi objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 metode teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Dokumentasi

Menghimpun data relevan yang diperoleh dari jurnal, skripsi, buku, dan ketentuan-ketentuan lain, berupa karangan ilmiah atau buku ilmiah lainnya yang didapat untuk dipelajari.

2. Observasi

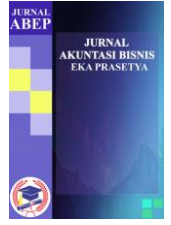
Dilakukan dengan cara memperoleh data yang bersumber dari KPP Medan Timur dan juga melalui situs internet Bank Indonesia.

Dalam penelitian ini, teknik analisis regresi linier berganda digunakan. Analisis regresi linear berkaitan dengan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan variabel independen/bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Inflasi (X1) dan Nilai Tukar Mata Uang (X2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Perhitungan dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan PPN
- a = Konstanta
- X₁ = Tingkat Inflasi
- X₂ = Nilai Tukar Mata Uang
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi Variabel Independen
- α = Koefisien Determinasi
- e = SError

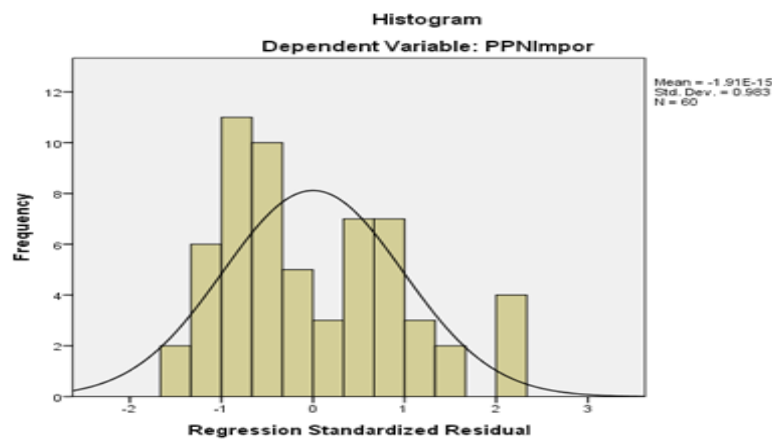


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

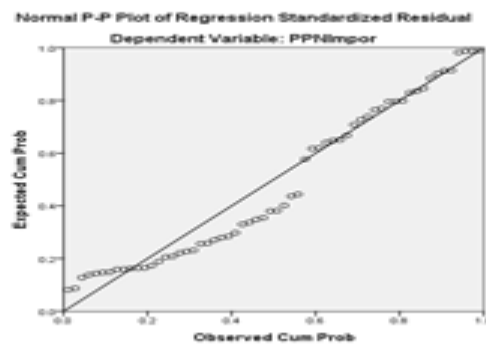
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitudengan analisis grafik dan uji statistik.



Gambar 2. Grafik Histogram

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa data menyebar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 3. Grafik Normal P-Plot

Dari Gambar 3 menunjukkan bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik Normal Probabilty Plot menunjukkan pola distribusi normal.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen (tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang) dan variabel dependen (penerimaan pajak pertambahan nilai impor). Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 4. Standardized Coefficients
Coefficients^a

Model	B	Std. Error	Standardized Coefficient = Beta
1 (Constant)	31.482.127.806,633	11.309.091.380,137	
Tingkat Inflasi	2.360.430.850,158	597.273.260,392	-.427
Nilai Tukar Mata Uang	4.397.177,118	1.178.799,958	.403

a. Dependent Variable: PPN Impor

Berdasarkan Tabel 4, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$\text{PPN Impor} = -31.482.127.806,633 - 2.360.430.850,158 \text{ Tingkat inflasi} + 4.397.177,118 \text{ Nilai Tukar Mata Uang} + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar -31.482.127.806,633 menunjukkan bahwanjika nilai variabel tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai penerimaan pajak pertambahan nilai impor akan mengalami penurunan sebesar 31.482.127.806,633 satuan.
2. Koefisien regresi (β) variabel TingkatInflasi sebesar -2.360.430.850,158 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai penerimaan pajak pertambahan nilai impor akan mengalami penurunan sebesar 2.360.430.850,158 satuan.
3. Koefisien regresi (β) variabel Nilai Tukar Mata Uang sebesar 4.397.177,118 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan nilai tukar mata uang mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai pajak pertambahan nilai impor akan mengalami peningkatan sebesar 4.397.177,118 satuan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. H0 diterima atau Ha ditolak jika thitung \leq ttabel dan nilai signifikansi $> 0,05$.
2. Ha diterima atau H0 ditolak jika thitung $>$ ttabel dan nilai signifikansi $< 0,05$.



Tabel 5. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Coefficients

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1.819	.074
Tingkat Inflasi	-3.952	.000
Nilai Tukar Mata Uang	3.730	.000

a. Dependent Variable: PPN Impor

Dari Tabel 5, maka dapat diketahui bahwa:

1. Variabel tingkat inflasi memiliki nilai thitung adalah sebesar -3.952 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0.05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 2.00172. Oleh karena itu, nilai thitung < ttabel yaitu dengan nilai $-3.952 < 2.00172$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai $0.00 < 0.05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 diterima, yang berarti variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor.
2. Variabel nilai tukar mata uang memiliki nilai thitung adalah sebesar 3.730 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi t yang memiliki signifikansi 0.05. Dari tabel distribusi t tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 2.00172. Oleh karena itu, nilai thitung > ttabel yaitu dengan nilai $3.730 > 2.00172$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai $0.000 < 0.05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H2 diterima, yang berarti variabel nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh dimensi variabel bebas secara serempak terhadap variabel terikat. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. H0 diterima atau Ha ditolak jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ dan nilai signifikansi > 0,05.
2. Ha diterima atau H0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05.

Tabel 6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model	F	Sig.
1 Regression	32.633	.000 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: PPN Impor

b. Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat diketahui nilai Fhitung adalah sebesar 32.633 dengan nilai signifikan sebesar 0.00. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang menggunakan signifikansi 5%. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai Ftabel sebesar



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



3.16. Oleh karena itu, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $32.633 > 3.16$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai $0.00 < 0.05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_3 diterima, yang berarti variabel tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai R Square. Berikut adalah nilai koefisien determinasi:

Tabel 7. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.713 ^a	.534	.517

a. Predictors: (Constant), Nilai Tukar Rupiah, Tingkat inflasi

b. Dependent Variable: PPN Impor

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,534 atau 53,4%. Hal ini berarti sebesar 53,4% variabel penerimaan pajak pertambahan nilai impor dapat dijelaskan oleh tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang, sedangkan sisanya sebesar 46,6 % variabel penerimaan pajak pertambahan nilai impor dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh bahwa Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang dapat menjelaskan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor sebesar 53,4% dan sisanya 46,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini contohnya jumlah pengusaha kena pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap Penerimaan PPN Impor Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai $-3.952 < 2.00172$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu $0.00 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis (H_1) diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN Impor.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai $3.730 > 2.00172$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu $0.000 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis (H_2) diterima. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai tukar mata uang maka akan meningkat penerimaan PPN impor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN Impor. Hal ini dapat dilihat dari hasil



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



pengujian hipotesis secara simultan (uji F) yang menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $32.633 > 3.16$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu $0.000 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis (H3) diterima.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Inflasi (X1) dan Nilai Tukar Mata Uang (X2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor (Y) ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda PPN Impor = $-31.482.127.806,633 - 2.360.430.850,158$ Tingkat inflasi + $4.397.177,118$ Nilai Tukar Mata Uang + e. Hal ini memberikan arti bahwa variabel tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor.
2. Secara parsial, tingkat inflasi tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor di KPP Pratama Medan Timur untuk periode 2014-2018 dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $-3.952 < 2.00172$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai $0.00 < 0.05$. Berarti, H1 diterima.
3. Secara parsial, nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor pada KPP Pratama Medan Timur untuk periode 2014-2018 dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $3.730 > 2.00172$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai $0.000 < 0.05$. Berarti, H2 diterima.
4. Secara simultan, variabel tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor pada KPP Pratama Medan Timur periode 2014-2018 dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $32.633 > 3.16$ dan nilai signifikan < 0.05 yaitu dengan nilai $0.00 < 0.05$. Berarti, H3 diterima.
5. Besarnya pengaruh yang diberikan tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai impor pada KPP Pratama Medan Timur periode 2014-2018 adalah sebesar 0,534 atau 53,4% (R Square). Hal ini berarti sebesar 53,4% variabel penerimaan pajak pertambahan nilai impor dapat dijelaskan oleh variabel tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang sedangkan sisanya sebesar 46,6% variabel penerimaan pajak pertambahan nilai impor dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. 2016. *Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ambarwati, Sri Dwi Aria. 2010. *Manajemen Keuangan Lanjut*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arifin, Muhammad. 2015. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal State College of Accounting*.
- Dalimunte, Esmil Saleh. 2015. Analisis Nilai Tukar Mata Uang Rupiah dan Tingkat Inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai Impor pada KPP Medan Kota. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Darsono dan R.Eki Rahman. 2018. *Pasar Valuta Asing Teori dan Praktik*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta
- Geminastiti, Kinanti dan Nella Nurlita. 2016. *Ekonomi*. Yrama Widya. Bandung.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)

e-ISSN. 2723-5947



- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mankiw, N. Gregory. Euston Quah dan Peter Wilson. 2014. Makro Ekonomi. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan – Edisi Terbaru 2016 . ANDI. Yogyakarta.
- Mashudi, Djohan, M. Taufiq dan Wiwin Priana. 2017. Pengantar Teori Ekonomi. Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Priantara, Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Purba, Taufik. 2017. Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang Rupiah terhadap Pajak Pertambahan Nilai Impor pada KPP Medan Kota periode 2013-2015. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Renata, Herna Almira. Kadarisman Hidayat dan Bayu Kaniskha. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN di KPP DJP Jawa Timur I(Jurnal Perpajakan Vol 9 No.1 perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Salman, Kautsar Riza. 2017. Perpajakan PPh dan PPN. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi. PT Pustakabarupress. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Utomo, St Dwiwarso, Yulita Setiawan dan Agung Yulinto. 2011. Perpajakan Aplikasi & Terapannya. Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- Yuliana, Diah. Marhamah dan Sutrisno. 2017. Analisis Pengaruh Infalsi dan Nilai Tukar Rupiah atas Dolar terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang) Jurnal STIE Semarang Vol 9 No.3 edisi Oktober 2017.

www.bi.go.id

www.junaidichaniago.wordpress.com